

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat
-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

KONTRIBUSI TEORI KEMISKINAN SEBAGAI *DEPRIVASI* *KAPABILITAS* DARI AMARTYA SEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Mathias Jebaru Adon, Gaspar Triono Jeraman

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang
Email: mathiasjebaruadon@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari pemikiran Amartya Sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Papua. Metodologi yang digunakan ialah analisis wacana kritis. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Sen sesungguhnya adalah sebuah alternatif kritis terhadap beragam wacana dan teori ilmiah yang kerap mengidentifikasi masalah kemiskinan sebagai kekurangan dalam pencapaian komoditas tertentu. Padahal teori-teori tersebut berbeda dengan standar universal dan standar masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, konsep pemikiran Amartya Sen sangat relevan untuk memahami kasus kemiskinan di daerah Papua dan Papua Barat dalam upaya pemberdayaannya. Sebab masyarakat Papua dan Papua Barat hidup di daerah yang secara sumber daya terbilang kaya, tetapi masyarakatnya kehilangan hak dan aksesnya untuk mengolah dan memberdayakan sumber daya alamnya. Akibatnya terjadi deprivasi kemampuan personal dan aspirasi kepentingan sosial-politik masyarakat Papua dan Papua Barat.

Kata kunci; Deprivasi, Ekonomi, Kapabilitas, Kemiskinan, Papua dan Papua Barat

Abstract

This study aims to examine the concept of poverty as a capability deprivation from Amartya Sen's thoughts about efforts to empower poor communities in Papua. The methodology used is critical discourse analysis. This research finds that Sen's thinking is a critical alternative to various scientific discourses and theories that often identify the problem of poverty as a deficiency in the attainment of certain commodities. Even though these theories are different from universal standards and the standards of the community concerned. Therefore, Amartya Sen's concept of thought is very relevant for understanding cases of poverty in the regions of Papua and West Papua and efforts to empower them. Because the people of Papua and West Papua live in areas that are relatively rich in resources, but the people lose their rights and access to process and empower their natural resources. The result is the deprivation of personal abilities and aspirations of the socio-political interests of the people of Papua and West Papua.

Keywords: Deprivation, Economy, Capabilities, Poverty, Papua and West Papua.

Pendahuluan

Mendefinisikan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, terutama karena kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Persoalan kemiskinan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh sebab kemiskinan sebagai kondisi hidup di bawah standar layak memiliki berbagai macam faktor. Salah satunya ialah sifat manusia tertentu yang tidak mau atau tidak mampu mengatasi kesenjangan sosial tersebut (Indro, 2013). Kemiskinan pada dasarnya adalah masalah sosial yang berkaitan dengan seluruh aspek hidup manusia. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi tetapi juga berbagai aspek hidup manusia yang berhubungan dengan pertumbuhan dan masa depan yang lebih baik (Indarti, 2017).

(Lister, 2004) mengatakan bahwa tidak ada satu pun konsep kemiskinan yang terlepas dari akar budaya dan sejarah (Lister, 2004). Oleh karena itu, upaya memahami kesejahteraan sosial diperlukan kerangka multidimensional guna memahami secara komprehensif dan koheren isu- isu terkini maupun fenomena sosial yang terjadi (Pradana, 2020). Sebab kelompok masyarakat yang berbeda cenderung mengkonstruksi cara pandang yang beraneka ragam terhadap penyebab dan cara penanggulangan kemiskinan. Definisi kemiskinan yang ditemukan dalam literatur akademik dan juga non-akademik cenderung bervariasi sesuai dengan aspeknya yang beragam. Beberapa di antaranya sebagai berikut: (a) pandangan dunia pengamat yang mungkin mengubah cara dia melihat fenomena kemiskinan; (b) struktur ekonomi, tatanan sosial dan juga keyakinan agama dapat mengubah juga cara pandang tentang akar atau penyebab kemiskinan; (c) menjadi miskin di negara berkembang mungkin berbeda dengan menjadi miskin di negara maju; (d) cara orang miskin melihat kondisi mereka sendiri mungkin berbeda dengan pandangan pembuat kebijakan atau peneliti (Lister, 2004). Definisi di atas hanya merupakan beberapa aspek yang menunjukkan betapa kompleksnya definisi kemiskinan.

Terlepas dari kesulitan dalam menemukan definisi umum, dari fenomena kemiskinan yang dianalisis dalam penelitian ini ialah ingin mencari konsep konsensus yang tepat. Hal ini bertujuan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dimana definisi itu dapat memandu kebijakan publik yang dirancang untuk memerangi kemiskinan atau memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin (Adon, 2021a). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Arius Jonaidi tahun 2012 Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk

miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11% (Jonaidi, 2012). Hal ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang membuat pertumbuhan ekonomi anjlok drastis. Di Indonesia hal yang sering terjadi ialah pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan bahkan kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan melainkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan yang membuat beberapa orang melakukan bunuh diri (Syawie, 2011).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seluruh pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang adil dan makmur; material dan spiritual berdasarkan Pancasila, dalam negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram dan tertib (Solikhatun, Masruroh, and Zuber, 2018). Memang diakui bahwa pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sejahterah tersebut dalam perjalanan bangsa Indonesia mengalami tantangan yang besar karena persoalan politik, budaya, masyarakat, teknologi dan alam. Misalnya, memburuknya situasi perekonomian Indonesia tahun 1997 selain masalah politik juga disebabkan oleh musim kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen sehingga menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran seperti kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Akibatnya kebutuhan hidup semakin melambung yang meningkatkan jumlah angka kemiskinan (Suyanto, 2001).

Namun penyebab kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan persoalan sosial budaya, politik dan partisipasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu berbagai ragam faktor penyebabnya, juga mempengaruhi rumusan dan model kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Nurwati, 2008). Maka definisi yang diadopsi guna menjadi indikator dalam mengadvokasi penanggulangan semua kebijakan publik yang mencoba membantu orang miskin, seperti yang dilakukan (Malthus, 1992) di akhir abad ke-18 dan beberapa penulis seperti (Murray, 1984). Hal ini diungkapkan Alcock (2006) bahwa kemiskinan adalah inti dari tugas kita dalam memahami

kemiskinan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kemiskinan sebelum kita dapat mengidentifikasi dimana dan kapan kemiskinan itu terjadi atau mencoba mengukurnya, dan sebelum kita mulai melakukan sesuatu untuk menguranginya (Alcock, 2006).

Melihat definisi tradisional tentang kemiskinan, ada kemungkinan untuk mengidentifikasi dua aliran utama yang telah mendapat dukungan cukup besar dari literatur: (a) perspektif absolut, yang berfokus terutama pada kondisi material yang minimal untuk menopang kehidupannya sendiri; dan (b) perspektif relatif, yang melihat kemiskinan sebagai fenomena yang bervariasi sesuai dengan taraf hidup masing-masing masyarakat. Perspektif lain yang akan menjadi fokus tulisan ini adalah konsep kemiskinan sebagai deprivasi (kekurangan) kapabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen (Sen, 1999). Pendekatan Sen ini dapat dilihat sebagai pandangan ketiga, yang mengakhiri dikotomi kemiskinan absolut versus relatif. Sen melihat kedua aspek sebelumnya itu memang penting, meskipun tidak cukup untuk memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan (Sen, 2009).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berisi perspektif Sen tentang kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dan sumbangsuhnya dalam memerangi masalah kemiskinan di daerah Papua dan Papua Barat. Selama tahun 2011 sampai 2017 Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki tingkat kemiskinan yang pertama dan kedua di Indonesia (Harianja, Sahara, and Muhammad Findi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Papua sebesar 27.62 persen (897.69 ribu orang) dan Papua Barat sebesar 25.10 persen (228.38 ribu orang). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kedua provinsi tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional tahun 2018 (Harianja et al., 2020). Padahal kedua provinsi tersebut memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Keberadaan PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak yang besar membuktikan kekayaan alam Papua.

Di sisi lain, wilayah laut di Papua Barat yang cukup luas menjadi peluang emas untuk mengembangkan sektor perikanan. Karena itu perairan laut di Papua Barat dapat menjadi salah prospek penting perekonomian di Papua Barat. Sebab nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2011 hingga 2017, perekonomian di Papua sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan

penggalan. Padahal secara sumber daya alam wilayah ini memiliki kekayaan alam dan laut yang melimpah. Di wilayah Papua Barat misalnya PDRB Provinsi Papua Barat Tahun 2015 subsektor perikanan menyumbang 5,48%, meningkat dari tahun sebelumnya 5.37% (Sari, Wambrauw, and Maspaitella, 2019). Hal ini membuktikan bila sektor perikanan dikelola dengan profesional mendongkrak dapat perekonomian di Papua Barat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin menjawab persoalan tersebut dalam terang pemikiran Amartya Sen. Secara lebih spesifik kami merumuskan arah penelitian ini dikerjakan lewat dua pertanyaan berikut: (a) Apa itu konsep kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas menurut Amartya Sen; (b) apa sumbangsih konsep ini dalam menganalisis kemiskinan di papua dan apa prinsip-prinsip pembangunan yang baik terutama dalam mengentaskan masalah kemiskinan itu? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, pada bagian pertama akan dibahas kajian literatur berupa perdebatan seputar studi-studi tentang kemiskinan hingga melahirkan teori kebaruan dari Sen. Bagian kedua berisi pemaparan masalah Kemiskinan di daerah Papua dan Papua Barat. Bagian ketiga melampirkan diskusi hasil penelitian. Artikel ini juga diakhiri penutup berupa kesimpulan dan saran.

Metode

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/ CDA). Sebagai sebuah metodologi dalam bidang ilmu sosial dan filsafat, metode CDA banyak mengusung riset analisis teks, berupa wacana dalam teori-teori ilmiah dan wacana sosio kultural dalam masyarakat. Analisis teks yang dimaksud bukan dipersempit dalam arti analisis tulisan-tulisan dalam dokumen dan data, melainkan yang ada dalam wacana-wacana tentang realitas, sistem sosial, kebudayaan, ideologi, kekuasaan, dan tradisi (Haryatmoko, n.d.).

Alat yang digunakan untuk memproduksi wacana adalah bahasa (Riyanto, 2020). Penggunaan dan pilihan teks bahasa dilakukan seiring misi dominasi kekuasaan tertentu. Tak jarang dalam permainan bahasa ini, subjek memanfaatkan ruang kesadaran palsu dari publik untuk distilisasi sehingga sejalan dengan kepentingan dengan pihak yang memproduksi wacana tersebut. Analisis wacana kritis dilakukan untuk membongkar wacana dominan yang diproduksi tersebut (Riyanto, 2018).

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan analisis wacana kritis didasari pada pemahaman bahwa gagasan kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari Amartya Sen

sesungguhnya adalah sebuah wacana baru dalam memberikan orientasi dan arah pemberantasan kemiskinan. Sebagai sebuah wacana, teorinya Sen ini pun dibangun dalam konteks perdebatan mengenai teori-teori kemiskinan sebelumnya. Tulisan ini berusaha menyingkapkan sumbangan khusus Sen dalam perdebatan itu sekaligus dijadikan alat analisis terhadap masalah kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan Absolut Versus Kemiskinan Relatif

Berbagai studi ilmiah yang serius tentang definisi kemiskinan sudah dilakukan sejak awal abad ke-20. Studi itu melahirkan definisi tentang kemiskinan absolut. Definisi absolut kemiskinan terkait dengan studi ilmiah pertama yang dilakukan oleh Rowntree dan rekan-rekannya pada awal abad ke-20. Definisi ini didasarkan pada gagasan 'subsisten atau minimal', yang dipahami sebagai kebutuhan minimum untuk mempertahankan hidup (Rowntree, 1902).

Menurut perspektif ini, orang-orang yang berada di bawah tingkat hidup minimal benar-benar miskin karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk hidup dan menopang kehidupan mereka sendiri dengan caranya sendiri. Jika uang tidak diberikan kepada mereka, mereka akan mati kelaparan; mereka akan membeku jika mereka tinggal di negara dengan cuaca dingin atau; mereka akan mati karena panas jika mereka tinggal di negara yang bercirikan suhu tinggi (Alcock, 2006).

Gagasan tentang kemiskinan absolut menuntut kita untuk memahami apa yang dibutuhkan orang untuk bertahan hidup dan kemudian memastikan bahwa orang miskin menerima ini, dan tidak lebih (Rowntree, 1902). Kemudian, tujuan dari tindakan publik adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kondisi minimal untuk mengakses makanan dan tempat tinggal sampai mereka mencapai garis kemiskinan, yang dapat didefinisikan dalam standar tertentu, misalnya US\$ 1,00 atau US\$ 2,00 per hari, atau dalam hal jumlah kalori tertentu dalam makanan, atau variabel lain, yang memungkinkan untuk menentukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Berlawanan dengan gagasan kemiskinan absolut, penelitian berikutnya menemukan konsep tentang kemiskinan relatif. Konsep relatif kemiskinan berakar pada kritik terhadap gagasan absolut tentang kemiskinan dan pencapaian negara kesejahteraan pasca perang di Inggris Raya. Gagasan kemiskinan relatif itu dipopulerkan oleh ahli ekonomi seperti Peter Townsend dan para kerabat penelitiannya. Argumen dasar mereka

merumuskan bahwa kebijakan untuk mencegah kemiskinan minimal tidak berpengaruh dalam hal membuat kondisi orang miskin lebih baik jika dibandingkan dengan standar hidup rata-rata di Inggris (Alcock, 2006). Untuk mendukung hal itu, penelitian telah menunjukkan bahwa yang termiskin tidak lebih baik pada periode antara 1950 dan 1960 daripada pada dekade 1940 saat perang berkecamuk di seluruh Eropa (Murray, 1984). Dengan kata lain, dari sudut ketersediaan sumber daya, semua masyarakat bisa mendapatkan distribusi yang adil, tetapi karena kekacauan politik membuat akses itu terbatas.

Menurut Townsend definisi relatif kemiskinan tidak hanya fokus pada pencapaian standar minimal komoditas, tetapi juga pada akses yang baik dalam kehidupan politik dan ekonomi yang baik. Berdasarkan klaim ini, Townsend merumuskan teori tentang kemiskinan relatif yang didefinisikan sebagai individu, keluarga dan kelompok dalam populasi dapat dikatakan miskin ketika mereka tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh jenis makanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang biasa di masyarakat tempat mereka berasal (P. A. Townsend, 1985).

Terlihat dalam kutipan tersebut bahwa seseorang dapat dikatakan miskin jika orang tersebut tidak dapat mengakses standar hidup rata-rata komunitasnya tidak hanya dalam hal makanannya, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemungkinan untuk memiliki fasilitas yang menjadi kebiasaan masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai praktek olahraga, seperti sepak bola, maka memiliki akses untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion, melalui radio, televisi, atau media lainnya, dapat menjadi elemen penting bagi seseorang untuk dianggap bagian dari masyarakat itu.

Definisi Townsend biasanya dilaporkan sangat mirip dengan teori Adam Smith dalam *Wealth of Nations*-nya yang mengatakan bahwa oleh keperluan, Saya mengerti tidak hanya barang-barang dagangan yang sangat diperlukan untuk menopang kehidupan tetapi apapun kebiasaan negara yang menjadikannya tidak pantas untuk orang-orang yang dapat dipercaya, bahkan dari urutan terendah sekalipun. Kemeja linen, misalnya, secara tegas tidak diperlukan dalam kehidupan. Tetapi di masa sekarang seorang pekerja harian yang terhormat akan malu tampil di depan umum tanpa kemeja linen (Smith, 1971).

Smith menunjukkan dalam kutipan ini bahwa kebutuhan minimal untuk hidup bervariasi sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat tempat orang tinggal. Ditinjau dari

istilah-istilah tersebut, menganggap bahwa seseorang miskin hanya karena ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal adalah definisi yang terlalu ketat. Smit sendiri melihat kenyataan ini di Inggris pada masanya. Pekerja sederhana pada masa itu akan merasa malu jika dia tidak memiliki kemeja linen atau bahkan sepasang sepatu kulit untuk tampil di depan umum. Kebutuhan orang-orang di masyarakat lain, di sebuah pulau kecil di beberapa daerah lokal tertentu, mungkin tidak akan sama.

Terhadap perspektif relatif, para pendukung kemiskinan absolut mengatakan bahwa argumen yang disajikan di atas dimaksudkan untuk membahas ketidaksetaraan, yang akan ada di setiap masyarakat. Selain itu, mereka mengatakan bahwa peneliti kemiskinan relatif secara tidak sah memperluas konsep kemiskinan untuk mengadvokasi redistribusi kekayaan. Bagi mereka, yang membela konsep absolut kemiskinan sedang menangani isu “utama” dari kondisi orang miskin, kurangnya penghidupan mereka, sementara peneliti yang membela konsep relatif mencoba mendekati sesuatu yang lebih dalam dan aspek yang lebih diperdebatkan, yaitu, masalah ketimpangan (Alcock, 2006).

Teori kemiskinan relatif berpendapat bahwa ini adalah kesalahpahaman karena pencapaian minimal bukanlah konsep yang stabil dan tetap hadir di setiap masyarakat dengan cara yang sama. Kemudian, sekali lagi, untuk memahami apa yang dipahami masyarakat tertentu sebagai kondisi penghidupan minimal, perlu dipahami pola-pola sosial yang ada. Jadi, studi tentang kemiskinan relatif tidak secara eksklusif merupakan proyek politik untuk memerangi ketidaksetaraan dan untuk mempromosikan redistribusi pendapatan atau kekayaan, ini adalah perspektif lain untuk mendefinisikan dan memerangi kemiskinan.

Jika pencapaian minimal adalah konsep kunci dalam perspektif kemiskinan absolut, peneliti yang mengadopsi definisi relatif difokuskan pada konsep deprivasi. Bagi mereka, deprivasi adalah konsep yang lebih luas daripada kemiskinan, tetapi mungkin digunakan untuk mendefinisikan lebih tepat siapa yang miskin. Menurut Townsend (1979) deprivasi adalah keadaan kerugian yang dapat diamati dan ditunjukkan relatif terhadap komunitas lokal atau masyarakat atau bangsa yang lebih luas di mana individu, keluarga atau kelompok berada (P. A. Townsend, 1985). Ide ini lebih berfokus pada kondisi, daripada sumber daya. Kondisi ini bisa lebih objektif yaitu yang material atau bisa lebih subjektif atau sosial.

Terlihat bahwa konsep deprivasi mampu menjelaskan hal-hal mendasar dari masalah kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan Townsend, adopsi konsep deprivasi memungkinkan untuk mempertimbangkan orang-orang yang tidak memiliki beberapa elemen yang secara luas disetujui dalam masyarakat mereka. Orang-orang yang memiliki akses ke makanan yang layak dan kondisi sandang, perumahan dan fasilitas rumah tangga (kondisi material) dapat dianggap miskin jika tidak ada akses kepada mereka ke sistem politik sebagai warga negara, atau jika tidak ada pengakuan mereka sebagai bagian dari masyarakat itu. Adalah mungkin untuk mengatakan, dalam istilah Townsend, bahwa orang-orang ini kekurangan dalam hal kondisi sosial, meskipun kondisi material minimal terpenuhi sepenuhnya. (P. A. Townsend, 1987)

Penting untuk dicatat bahwa kedua definisi, absolut dan relatif memiliki kelebihan serta batasannya sendiri. Mengingat hal itu, Alcock (2006) mengatakan bahwa mengadopsi salah satunya saja tidak dapat diterima atau dapat diterapkan. Jika kita ingin mempertahankan kemiskinan sebagai dasar untuk analisis pengukuran dan pada akhirnya tindakan politik, kita perlu menghindari melepaskan diri dari keduanya, atau lebih tepatnya untuk memilih salah satu saja dari antaranya (Alcock, 2006).

Kemiskinan Sebagai Deprivasi Kapabilitas Menurut Amartya Sen

Pada periode 1983-1985 jurnal Oxford Economic Papers menerbitkan perdebatan antara Sen dan Townsend mengenai definisi kemiskinan. Makalah-makalah ini berpengaruh untuk menegakkan batas-batas dikotomi antara konsep kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, serta menunjukkan kebaruan Sen lewat gagasan perluasan kapabilitas demi memberantas masalah kemiskinan.

Sen mengakui bahwa konsep kemiskinan relatif telah menjadi konsensus dalam studi kemiskinan, dan konsepsi ini, menurut dia memiliki beberapa manfaat atas konseptualisasi sederhana dari kemiskinan absolut (Sen, 1983). Namun, konsepsi relatif tentang kemiskinan gagal untuk mengakui beberapa aspek absolut yang hadir dalam fenomena kemiskinan. Sen (1983) menganggap bahwa pada akhirnya kemiskinan harus dilihat terutama sebagai gagasan absolut, meskipun spesifikasi tingkat absolut harus dilakukan dengan cara yang sangat berbeda dari cara yang biasa dilakukan di tradisi yang lebih tua (Sen, 1983).

Terlepas dari kontribusi dua perdebatan sebelumnya, menurut Sen, dua perspektif itu telah gagal secara khusus karena dua masalah umum: (a) peneliti dalam teori kemiskinan absolut sering memutlakan kepastiaan standar hidup dari waktu ke waktu dan di segala tempat; (b) sebaliknya, peneliti dari teori kemiskinan relatif cenderung mengabaikan standar hidup minimal yang perlu dibuat kategori standar untuk dicapai berdasarkan perencanaan yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya (Sen, 1985).

Menurut Sen, definisi kemiskinan relatif akan melibatkan variasi dari waktu ke waktu, sementara perspektif absolut akan melibatkan ketetapan dari waktu ke waktu dari variabel kuncinya. Kemutlakan kebutuhan tidak menyatakan kepastian mereka dari waktu ke waktu (Sen, 1992). Kemudian, baik definisi absolut maupun relatif dari kemiskinan tidak melibatkan kepastian dari waktu ke waktu. Bahkan di bawah pendekatan absolut, garis kemiskinan akan menjadi fungsi dari beberapa variabel, dan tidak ada alasan apriori mengapa variabel-variabel ini mungkin tidak berubah dari waktu ke waktu (Sen, 1983).

Kritik kedua menganggap bahwa masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut fakta relatif lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, tetapi juga masalah perbedaan mutlak antara orang-orang. Dengan kata lain, kemiskinan absolut seseorang dalam suatu ruang tertentu dapat bergantung pada kedudukan relatifnya di suatu ruang lain (Sen, 1983). Sen berpendapat bahwa inti absolut dari kemiskinan adalah ketiadaan atau kehilangan kapabilitas, sementara ada aspek relatif dari kemiskinan terkait dengan penyediaan barang atau bahkan pendapatan (Sen, 1985).

Pada titik ini, Sen memperkenalkan konsepnya tentang kemiskinan yang berfokus pada gagasan tentang penguatan kapabilitas. Fokus yang tepat dari kemiskinan bukanlah pada komoditas, tetapi dalam penguatan kapabilitas, yaitu dalam kebebasan nyata bahwa orang benar-benar harus mewujudkan apa yang mereka inginkan. (Sen, 1992). Kapabilitas dapat dipahami sebagai semacam kebebasan yang memungkinkan individu untuk memilih jenis keberfungsian yang disukainya dengan kemungkinan pilihan yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat juga sebagai kebebasan untuk memiliki hidup layak (Callinicos, 2004). Contoh keberfungsian hidup layak yaitu berada dalam keadaan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang memadai, serta kondisi sosial dan ekologis yang nyaman untuk dihuni.

Dalam pengertian itu, Sen (1983) menyimpulkan bahwa ketika mempertimbangkan definisi kemiskinan, penting untuk mengambil kapabilitas sebagai komponen mutlak,

tetapi komoditas yang diperlukan untuk seseorang berfungsi secara memadai dapat dianggap sebagai relatif. Menganalisis kutipan Smith di atas, ia mengatakan bahwa kapabilitas menghindari rasa malu untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah alasan mengapa pekerja Inggris harus menggunakan kemeja linen dan sepatu kulit, di masyarakat lain komoditasnya mungkin lain, misalnya jubah sutra dan sandal, dll. Kemudian, bagi Sen tidak ada konflik antara perspektif kemiskinan absolut dan relatif (Sen, 2009). Keduanya saling berkaitan dan berhubungan erat. Komponen absolut dari kemiskinan adalah ketiadaan kapabilitas yang mempengaruhi pencapaian relatif dari komoditas masing-masing orang.

Menurut Sen, ada tiga identifikasi penting dalam memahami kemiskinan, yaitu: (1) Penyebab mutlak dari kemiskinan adalah adanya deprivasi kapabilitas (2) ada pengaruh deprivasi kapabilitas pada kemiskinan nyata masing-masing orang dan pengaruh pada tingkat kepemilikan komoditas serta pendapatan yang menjamin hidup layak; (3) perbedaan pendapatan dan tingkat kepemilikan komoditas memang dapat menjadi identifikasi langsung dari tingkat kemiskinan masing-masing orang, tetapi identifikasi itu lebih sebagai dampak, bukan penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga meskipun penting dilihat tetapi sifatnya sangat relatif karena disesuaikan dengan standar hidup layak di setiap negara atau komunitas politis tertentu (Sen, 1992). Dengan demikian, menurut Sen sumber masalah absolut dari kemiskinan adalah kekurangan kapabilitas atau deprivasi kapabilitas, sementara aspek yang relatif dari kemiskinan adalah jumlah pendapatan per orang.

Sen mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebagai ketiadaan kapabilitas. Ketidadaan kapabilitas ini berhubungan erat dengan kapabilitas individu dalam mengkonversi komoditas dan pendapatan sesuai nilai, bentuk hidup dan kepentingan yang dianggapnya berharga dan punya alasan untuk dipilih. Faktor-faktor konversi itu terdiri dari : (1) Faktor heterogenitas pribadi, menyakut pengaruh kondisi fisik dan mental personal terhadap kapabilitas individu dalam mengakses komoditas; (2) faktor lingkungan fisik, ini mengenai kondisi geografis, iklim, epidemiologi, ataupun polusi, yang membuat biaya hidup individu semakin mahal, (3) faktor kondisi sosial, seperti penyediaan layanan publik, pendidikan, jaminan keamanan, dan sifat hubungan dalam masyarakat, kelas sosial atau etnis; faktor ini seringkali berkaitan dengan akses dan legitimasi demi pengembangan kapabilitas dan kepemilikan komoditas; (4) perbedaan

dalam perspektif relasional, ini berkaitan dengan konvensi masyarakat yang menentukan persyaratan komoditas dari standar perilaku dan konsumsi yang diharapkan, sehingga kemiskinan relatif di komunitas kaya dapat diterjemahkan ke kemiskinan absolut dalam komunitas miskin (Rosadisastira, 2014). Misalnya, persyaratan lokal tentang 'kemampuan untuk tampil di depan umum tanpa rasa malu' dalam hal pakaian dapat diterima bervariasi, sehingga sangat menentukan besaran biaya hidup yang ditanggung; (5) distribusi dalam keluarga, distribusi dalam keluarga menentukan misalnya alokasi makanan dan perawatan kesehatan antara anak-anak dan orang dewasa, pria atau wanita (Sen, 2009).

Diagnosis penyebab kemiskinan dari sudut tingkat kapabilitas untuk mengkonversi komoditas akan menyasar kenyataan yang luas dan fundamental. Banyak dari faktor konversi ini juga akan mempengaruhi kapabilitas individu untuk mengakses dan memilih sumber daya sesuai kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka miliki. Misalnya, penyandang cacat fisik atau mental seringkali memiliki persyaratan hidup yang lebih mahal untuk mencapai kapabilitas yang sama seperti orang normal dan juga pada saat yang sama mereka memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mendapat penghasilan (S., 2015). Begitu pula yang hidup di lingkungan geografis yang rawan dan mereka yang hidup di daerah konflik, serta dalam budaya yang diskriminatif, misalnya perempuan dilarang bersekolah dan ikut berpolitik (Rosadisastira, 2014). Mereka sama-sama membutuhkan biaya hidup yang mahal dan akses yang sulit terhadap sumber daya.

Dengan demikian, mendistribusikan kepada mereka 1.5 USD sehari seperti kebanyakan orang adalah solusi yang sangat cacat, begitu pula jika situasi kemiskinan mereka dibiarkan pada konsensus masyarakat lokal, mereka barangkali akan mengatakan baik-baik saja, tetapi dengan penderitaan hati yang sangat mendalam, misalnya karena alasan kelas sosial dan gender yang melarang mereka untuk berbicara (S., 2015).

Menurut Sen, pengentasan kemiskinan harus fokus pada memaksimalkan apa yang dapat dipilih individu untuk dicapai dalam hidup, seperti kapabilitas untuk memilih berbagai nilai budaya dan praktik untuk diadopsi. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan individu yang didefinisikan sebagai pencapaian aktual dari pilihan individu yang berasal dari berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Dengan cara pandang tadi, identifikasi terhadap penyebab kemiskinan akan menjadi holistik dan

berjangkauan luas. Ini akan melihat tidak hanya langkah-langkah ekonomi tetapi langkah-langkah hak asasi manusia dan akses (Sen, 1999).

Sebagai pedoman, Amartya Sen mengusulkan lima kebebasan umum yang dapat menopang penguatan kapabilitas, yang jika dikurangi akan menimbulkan deprivasi atau kemiskinan, yaitu: (1) Kebebasan politik termasuk hak-hak sipil; (2) fasilitas ekonomi yang meliputi akses terhadap kredit; (2) peluang sosial yang mencakup pengaturan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya; (3) transparansi dalam hubungan antara orang-orang dan antara orang-orang dan pemerintah; dan (5) perlindungan keamanan yang mencakup jaring pengaman sosial dan ekonomi seperti tunjangan pengangguran dan kelaparan serta bantuan darurat (Sen, 1985).

Melalui kelima lensa di atas, kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai masalah keterbatasan pencapaian komoditas minimal, tetapi lebih luas sebagai ketiadaan atau terjadi karena penghilangan kapabilitas, sehingga individu tidak dapat menikmati berbagai pilihan dan memiliki kapabilitas aktual untuk mewujudkan pilihan yang telah dibuatnya.

Fenomena Kemiskinan di Papua dan Papua Barat

Salah satu pekerjaan rumah yang mendesak dalam pembangunan di Indonesia adalah melakukan pengentasan kemiskinan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Lewat Perpres No. 63 tahun 2020. Presiden Jokowi menetapkan beberapa daerah tertinggal di Indonesia. Dari beberapa daerah yang ditentukan Jokowi, dua di antaranya, yaitu Papua dan Papua Barat berada di tingkat kemiskinan tertinggi. Laporan Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa untuk Provinsi Papua Barat tingkat persentase penduduk miskin per Maret 2020 mencapai 32,70 % dan September 2021 mencapai 33, 20 %; sementara Provinsi Papua periode Maret 2020 mencapai 35, 50 % dan September 2021 mencapai 35, 69 % (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Sementara Laporan BPS menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terbawah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Laporan BPS tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Papua Barat 2019 (64, 70 %), 2020 (65,09 %), 2021 (65,26 %); sementara Papua 2019 (60,84), 2020 (60,44), 2021 (60,62). Indeks ini diukur dari tingkat

kesehatan, pendidikan, harapan hidup, keamanan, transparansi penggunaan keuangan, dan pendapatan, hampir semuanya menduduki angka terendah. (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kedua laporan di atas tentu terdengar paradoks sebab Provinsi Papua dan Papua barat justru merupakan pemasok sumber daya alam terbesar di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan secara masif (Budiratna and Qibthiyah, 2020). Hutan di Papua merupakan hutan terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 40 juta hektar, di mana 52 persen hasil hutan digunakan untuk kebutuhan komersial, sedangkan sisanya 48 persen dibudidayakan sebagai hutan lindung dan untuk tujuan konservasi (Winarno, 2013).

Sampai saat ini, pemerintah juga tetap membuka pintu bagi investor asing untuk mengelola sumber daya alam Papua. Salah satu perusahaan asing yang terkenal adalah PT Freeport milik AS, yang mengelola emas, perak dan tembaga sejak tahun 1967 (Budiratna and Qibthiyah, 2020). Penguasaan pemerintah pusat atas pengelolaan sumber daya alam Papua diperkuat dengan pengiriman militer khusus di Papua (Wulansari, 2017). Kenyataan ini menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya atas daerah Papua dan Papua Barat benar-benar dikeruk oleh kepentingan pasar, terutama para pemilik modal asing dan oleh elit-elit nasional. Sebaliknya masyarakat Papua sendiri hidup dibawah garis kemiskinan.

Implikasi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan Di Papua dan Papua Barat

Berdasarkan kajian sebelumnya ada beberapa implikasi teoritis dan praktik kebijakan sosial dari definisi Sen tentang kemiskinan sebagai kehilangan kapabilitas (Indarti, 2017). Dalam penelitian ini, penulis mengelaborasi penemuan Sen ini dalam poin-poin berikut: *Pertama*, terlihat bahwa definisi kemiskinan yang diusulkan sebagai deprivasi kapabilitas terdiri dari pengertian kemiskinan yang absolut dan relatif. Dalam hal ini Sen tidak menyangkal pentingnya proses sosial yang menentukan standar hidup yang dimiliki bersama di antara individu dalam komunitas tertentu dan kemudian kita dapat mengatakan bahwa keberfungsian yang diperlukan seseorang untuk dianggap sebagai bagian dari komunitas tertentu bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, seperti yang telah didiagnosis Townsend dan rekan-rekannya (P. A. Townsend,

1979). Tetapi ada inti mutlak dalam pengertian kemiskinan, yaitu fakta bahwa orang yang miskin tidak memiliki kapabilitas untuk memilih dan memiliki terhadap bentuk kehidupan layak tertentu (Prasetyantoko, 2011).

Kedua, definisi kemiskinan ala pendekatan kapabilitas dapat dianggap penting karena tidak hanya berfungsi sebagai konsep kerja yang dapat membantu penelitian empiris tentang kemiskinan, tetapi juga dapat memandu tindakan politik (Prasetyantoko, 2011). Berbeda dari pengertian absolut dan relatif yang disajikan dalam uraian sebelumnya, pandangan Sen tentang kemiskinan berakar pada landasan filosofis yang memungkinkan analisis tentang fenomena kemiskinan; keadilan sosial, kesejahteraan, dan juga analisis empiris tentang cara bagaimana orang-orang sebenarnya hidup dan dapat dijadikan sebagai dasar dan orientasi pada desain kebijakan sosial yang mencoba untuk menghadapi fenomena kemiskinan dengan meningkatkan berbagai pilihan orang miskin, tanpa alih-alih membimbing mereka dengan cara hidup tertentu (Sen, 2009).

Ketiga, yang harus digarisbawahi adalah bahwa definisi Sen tentang kemiskinan berbeda dari definisi absolut dan definisi relatif karena mengakui bahwa penting untuk melihat perbedaan dalam beragam faktor konversi yang dimiliki orang, yang dapat mendukung atau bahkan menghambat konversi pendapatan atau bahkan komoditas menjadi kapabilitas (Sen, 1992). Perspektif kemiskinan relatif berbeda dengan kemiskinan absolut, karena mempertimbangkan variasi antarsosial di antara masyarakat, tetapi tidak mengakui adanya variasi antar pribadi juga, seperti heterogenitas pribadi dan variasi di antara anggota keluarga atau rumah tangga (Pattiasina, 2021).

Keempat, yang dapat digarisbawahi adalah bahwa definisi kemiskinan ini memungkinkan kita untuk melihat seperangkat kapabilitas yang dianggap layak oleh setiap komunitas atau juga mempermasalahkannya dengan menyerahkannya pada proses penalaran publik. Bagi Sen, bukanlah tugas peneliti untuk menentukan kapabilitas mana yang bernilai universal dan mana yang tidak (Smith, 1971). Hal itulah yang membuat Sen tidak menawarkan daftar kapabilitas yang tertutup tetapi disisi lain ia menganjurkan pentingnya demokrasi, dipahami sebagai "pemerintahan dengan diskusi", sebagai ruang di mana orang akan memiliki kondisi untuk memprioritaskan defisit kapabilitas yang menuntut tindakan pemerintah.

Di sisi lain, Sen menganggap bahwa peneliti dapat membangun daftar kapabilitas untuk tujuan penelitian tertentu dan, dengan cara ini, kita dapat menekankan aspek

tertentu dalam mengukur kemiskinan secara relatif. Tetapi, aktivitas ini tidak mengikuti usulan Townsend terutama dalam menentukan standar hidup komunitas tertentu secara sewenang-wenang. Perspektif Sen mencoba menghindari kritik semacam ini dengan menekankan bahwa peneliti atau pengambil kebijakan publik seharusnya tidak secara eksklusif mendefinisikan apa barang dan interaksi sosial yang harus dimiliki seseorang agar tidak miskin (Adon, 2021b). Komunitas sendiri yang sedang diteliti harus memiliki suara untuk mewujudkan kapabilitas mana yang relevan bagi mereka.

Empat poin yang dikemukakan di atas menunjukkan kepada kita bahwa definisi kemiskinan dalam hal perampasan kapabilitas bisa sangat memadai, tidak hanya sebagai definisi filosofis, yang telah mendasarkan penelitian yang sangat penting di lapangan, tetapi juga sebagai konsep praktis, yang memungkinkan kita untuk melihat defisit kapabilitas tersebut, serta memperkuat berbagai pilihan yang layak bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Empat poin yang diskusi di atas sesungguhnya mengkonfirmasi kenyataan paradoksal dari masalah kemiskinan Papua dan Papua Barat. Sejak awal, Sen menyadari bahwa keterbatasan komoditas sering bukanlah masalah utama dari segala masalah ketidaksetaraan dan kemiskinan, tetapi lebih pada kehilangan atau deprivasi kapabilitas, berupa klaim dan hak yang bebas atas komoditas. Dengan demikian, signifikansi keberadaan komoditas di Papua dan Papua Barat tidak banyak berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara umum (Ferezagia, 2018). Hal ini jelas karena kapabilitas mereka dalam hal akses terhadap kebebasan politik, ekonomi, peluang sosial, keamanan, kurang diakomodasi secara adil. Klaim ini dapat dibuktikan dengan tingkat indeks pembangunan manusia Papua yang juga berada di dua terbawah dari antara provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Simpulan

Sen memandang kemutlakan kemiskinan dalam hal deprivasi kapabilitas. Deprivasi itu terutama terjadi karena kurangnya kebebasan dan akses, serta kepercayaan serta dukungan masyarakat dalam peningkatan kapabilitas setiap individu, seperti akses dalam lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik serta akses infrastruktur dan informasi. Ketiadaan kebebasan dan akses itu membuat orang kesulitan untuk mengembangkan kapabilitas dirinya kesulitan mengejar komoditas yang layak bagi hidupnya.

Oleh karena itu, pemikiran Sen ini dapat dijadikan paradigma dalam pengentasan kemiskinan di Papua dan Papua Barat dengan memperhatikan beberapa masukan berikut: *Pertama*, Bagi pengambil kebijakan nasional dan daerah. Mereka diharapkan mengadakan kebijakan yang sifatnya partisipatif lewat dialog dengan orang Papua dan Papua Barat sendiri. Kebijakan pembangunan masyarakat Papua diharapkan tidak berbasis pada pengelolaan sumber daya dan infrastruktur belaka, tetapi memberikan porsi yang besar pada perluasan kapabilitas masyarakat lokal, lewat peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengaturan keseimbangan pasar untuk mendistribusikan sumber daya yang dihasilkan warga, menjamin iklim *good governance* dalam lingkup birokrasi, dan menjamin keakraban dalam masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan ekologis.

Kedua, Bagi masyarakat Papua sendiri. Perlunya dialog yang serius dalam lingkup internal, antara pemerintah lokal dan tokoh masyarakat, serta dengan masyarakat secara umum, mengenai (a) nilai-nilai sosial dan kemanusiaan apa yang patut dijaga bersama berdasarkan dialog dengan tuntutan dunia kontemporer yang berkontribusi demi pemberdayaan dan keberlanjutan pembangunan dan peradaban Papua (b) dan menentukan nilai-nilai tradisi yang perlu ditinggalkan atau ditransformasi, terutama sikap etnosentrisme kesukuan yang menghalangi dan merusak transparansi dan saling percaya di antara mereka sendiri.

Referensi

- Adon, M. J. (2021a). Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT dalam Pemilu bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Armada Riyanto. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(3), 242–265.
- Adon, M. J. (2021b). Mahasiswa sebagai Agent of Changes dalam Mewujudkan New Normal sebagai Politik Bonum Commune di Masa Pandemi dalam Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto. *Sains Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Alcock, P. (2006). *Understanding Poverty*. Lodon: Palgrave McMillan.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. Retrieved March 29, 2023, from BPS website: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut

- Provinsi 2020-2022. Retrieved March 23, 2023, from BPS website: <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Budiratna, H., and Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 1–13.
- Callinicos, A. (2004). Equality of what? *Contemporary Political Theory: A Reader*, 36–44. <https://doi.org/10.4135/9781446215272.n5>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Harianja, Y., Sahara, and Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 20011-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- Haryatmoko. (n.d.). *Critical Discourse Analysis (Analisis wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers.
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- Indro, N. P. Y. (2013). Kemiskinan Global Sen Amartya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(13), 23–34. Retrieved from <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/538>
- Jonaidi, A. (2012). Bahan mendeley analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. *Kajian Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Lister, R. (2004). *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Murray, C. (1984). *Losing Ground: American Social Policy 1950-1980*. New york: Basic Books.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- P. A.Townsend. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Berkeley; Los Angeles: University of California.
- P. A.Townsend. (1985). Sociological Approach to Measurement of Poverty: a Rejoinder to Professor Amartya Sen. *Oxford Economic Papers*, 37(4), 659–688.
- P. A.Townsend. (1987). Deprivation. *Journal of Social Policy*, 16(2), 125–144.

- Pattiasina, S. M. O. (2021). Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan. *BIA Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(1), 100–112. Retrieved from <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia> Pemberdayaan
- Pradana, R. A. (2020). Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 3(2), 87–101. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717>
- Prasetyantoko, A. (2011). Krisis Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Amartya Sen. *Respons*, 16(02), 181–197.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi Pemantik dan Anatomi Riset Filosofis Teologis* (1st ed.). Malang: Widya Sasana Publication.
- Rosadisastra, A. (2014). Membangun Identitas Peradaban di Global:Telaah Pemikiran Amartya Sen. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 141–162.
- Rowntree, B. S. (1902). *Poverty: A Study of Town Life*. Universitas Harvard: Macmillan.
- S., S. (2015). Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan. *Al-Buhuts*, 11(1), 1–10.
- Sari, A. P., Wambrauw, L. T., and Maspaitella, M. R. (2019). Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan Dan Lembaga Pemasaran Perikanan Tangkap Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2(1), 78–86. <https://doi.org/10.36883/jfres.v2i1.22>
- Sen, A. (1983). Poor, Relatively Speaking. *Oxford Economic Papers*, 35(2), 153–169.
- Sen, A. (1985). Well-being, Agency and Freedom: The Dewey lectures. *The Journal of Philosophy*, 82(2).
- Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined*. Harvard: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press.
- Smith, A. (1971). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Basel: Tourneisen and Legrand.
- Solikatun, S., Masrurroh, Y., and Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan.

Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>

Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.

Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Sosio Informa*, 16(3), 213–219. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>

Winarno, E. (2013). *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).

Wulansari, I. (2017). Paradoks Pembangunan dalam Kemiskinan Struktural di Papua. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 88–95.